



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Live di Youtube
Kementerian Keuangan

Press Statement Menteri Keuangan

MENGENAI KEBIJAKAN CUKAI ROKOK

Kamis, 10 Desember 2020

Pukul 11.00 WIB



1. Pengendalian Konsumsi (RPJMN)

Penerapan cukai sebagai upaya pengendalian konsumsi ditujukan untuk mendukung RPJMN melalui penurunan prevalensi merokok, khususnya usia 10-18 tahun yang ditargetkan menjadi 8,7 % di tahun 2024

5. Penerimaan

Kebijakan cukai harus mampu mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara dimana target penerimaan cukai 2021 sebesar 173,781



4. Rokok Ilegal

Kebijakan cukai HT agar tidak menjadi disincentif bagi rokok legal

2. Tenaga Kerja

Kebijakan cukai mempertimbangkan dampak terhadap tenaga kerja pada sektor hasil tembakau dimana pada tahun 2017 terdapat 158.552 **pekerja langsung** yang terkonsentrasi pada golongan 3 dan jenis SKT

3. Petani

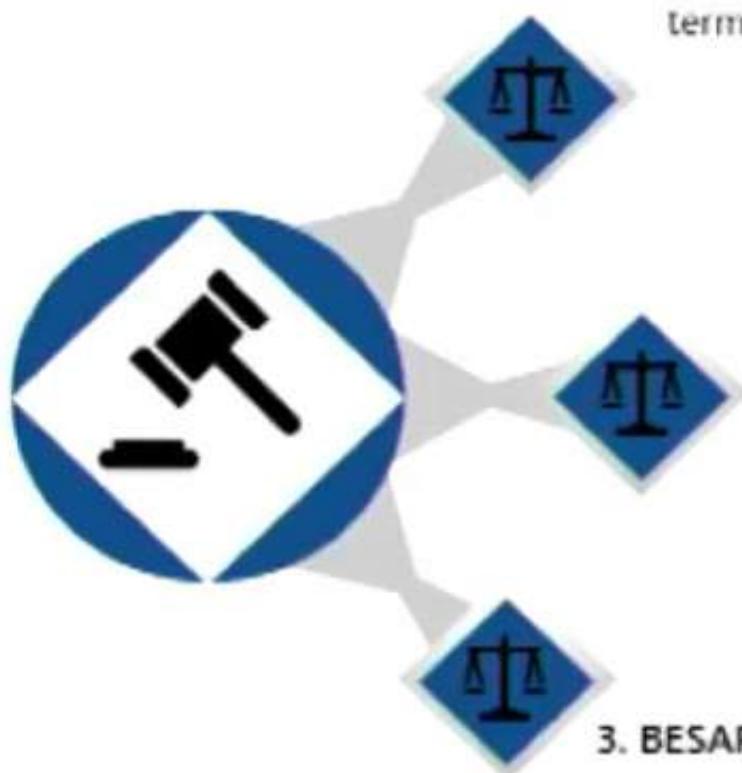
Kebijakan cukai mempertimbangkan dampak terhadap petani dimana pada tahun 2020 terdapat 526.389 (KK)- setara + 2,6jt orang (asumsi 1 KK=5 Orang) yang terlibat di dalam sector pertanian tembakau

Catatan: total orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan Industri Hasil Tembakau sekitar 6-7jt orang



1. HANYA BESARAN TARIF CUKAI YANG BERUBAH

Tahun 2021 merupakan tahun pemuliharaan bagi hampir semua industri termasuk industri hasil tembakau



2. TIDAK DILAKUKANNYA SIMPLIFIKASI

- a. Tidak dilakukannya simplifikasi layer tarif pada tahun 2021 ditujukan agar pabrikan tidak mendapat pukulan ganda dari kenaikan tarif dan dampak simplifikasi
- b. Namun demikian, sinyal simplifikasi tersebut tetap ada dengan penyempitan gap tarif SKM IIA dan IIB serta SPM IIA dan IIB

3. BESARAN HJE SESUAI DENGAN KENAIKKAN PER LAYER

Harga banderol (HJE) dipasaran akan mengalami penyesuaian sesuai dengan kenaikan tarif masing-masing

KEBIJAKAN CHT PER JENIS & LAYER TARIF

TAHUN 2021



Golongan	2020		2021		
	Tarif (Rp/btg)	Produksi (miliar btg)	Kenalkan Tarif (Rp/btg)	Tarif Cukai 2021 (Rp/btg)	
SKM I	740	163,4	125	16,9%	865
SKM II A	470	13,5	65	13,8%	535
SKM II B	455	40,2	70	15,4%	525
SPM I	790	6,6	145	18,4%	935
SPM II A	485	2,7	80	16,5%	565
SPM II B	470	2,2	85	18,1%	555
SKT I A	425	10,8	0	0,0%	425
SKT I B	330	26,9	0	0,0%	330
SKT II	200	4,1	0	0,0%	200
SKT III	110	27,7	0	0,0%	110
Total/Avg	298,4		12,5%		

- a. Di tahun 2021, secara rata-rata tertimbang kenalkan tarif cukai HI sebesar 12,5%. Kenalkan ini lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan tahun sebelumnya yang sebesar 23%.
- b. Untuk jenis SKT, diperlukan tarif cukainya tidak mengalami kenaikan. mempertimbangkan sektor padat karya dan mengingat dalam masa pemulihuan perekonomian akibat pandemic covid-19.
- c. Untuk produk SKM II B dan SPM II B kenaikan tarifnya lebih tinggi dari pada SKM II A dan SPM II A, untuk mempersempit gap tarif, sebagai sinyal simplifikasi.

- Est. Pertumbuhan produksi ▼ 3,2%
- Est. Volume produksi **288,8 miliar btg**
- Prevalensi merokok ▼ 1,6% (33,8% → 32,2%)
- Affordability indeks **13,63%** (naik dari 13,42%)



5. Dengan format kebijakan ini diproyeksikan:

- Produksi rokok turun sebesar 2,2% - 3,3%
- **Affordability index** naik dari 12,2% menjadi **13,7-14,0%**, menunjukkan harga rokok semakin tidak terjangkau.
- Prevalensi merokok **dewasa** turun menjadi **32,3-32,4%** dan **anak-remaja** turun menjadi **8,8-8,9%**. Penurunan ini konsisten dengan target RPJMN 2020-2024 (8,7% di tahun 2024)

1. Besaran 12,5% merupakan rata-rata terlimbang dari kenaikan tarif cukai per jenis rokok



2. Dengan mempertimbangkan situasi pandemik dan HT adalah sektor padat karya, maka untuk jenis SKT pada tahun 2021 tidak dinaikkan.

4. Besaran kenaikan per layer dalam 1 golongan untuk SKM dan SPM dibedakan dengan memberi beban ke layer bawah. Ini dimaksudkan untuk tetap memberi sinyal penyederhanaan.

3. Kebijakan Cukai tahun 2021 refocusing ke pengendalian konsumsi. Pengendalian ini ditandai dengan besaran kenaikan cukai lebih dominan ke SKM yang memiliki market share terbesar yaitu 71,4% (SKM) dan kepada produk yang local contentnya rendah (SPM).



Perkembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)

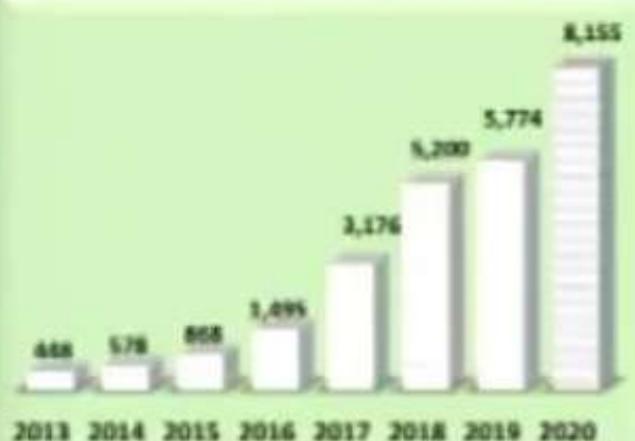


Penindakan Rokok Ilegal

2013 s.d. 2020



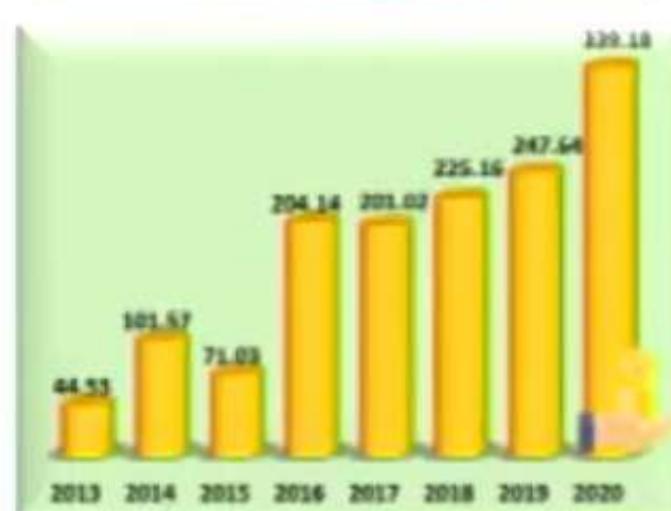
JUMLAH PENINDAKAN



JUMLAH BHP (JUTA BATANG)



PERKIRAAN NILAI BHP (MILIAH Rp)



Sumber Data : app.penindakan.net

Data Penindakan YoY per 30 Nov 2020

1. Sejak 2017 sd. 2020, penindakan terhadap rokok ilegal mengalami tren meningkat.
2. Pada 2020, jumlah penindakan sebanyak 8.155 kali, meningkat 41,23% secara YoY terhadap 2019, dengan hit rate 25 tangkapan/hari



PEMANFAATAN DBH CHT



3. PENEGAKAN HUKUM (25%)

- Pembentukan Kawasan/Lingkungan/Sentra Industri Hasil Tembakau
- Operasi bersama pemborongan BKC legal & sosialnya ketentuan di bidang

1. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (50%)

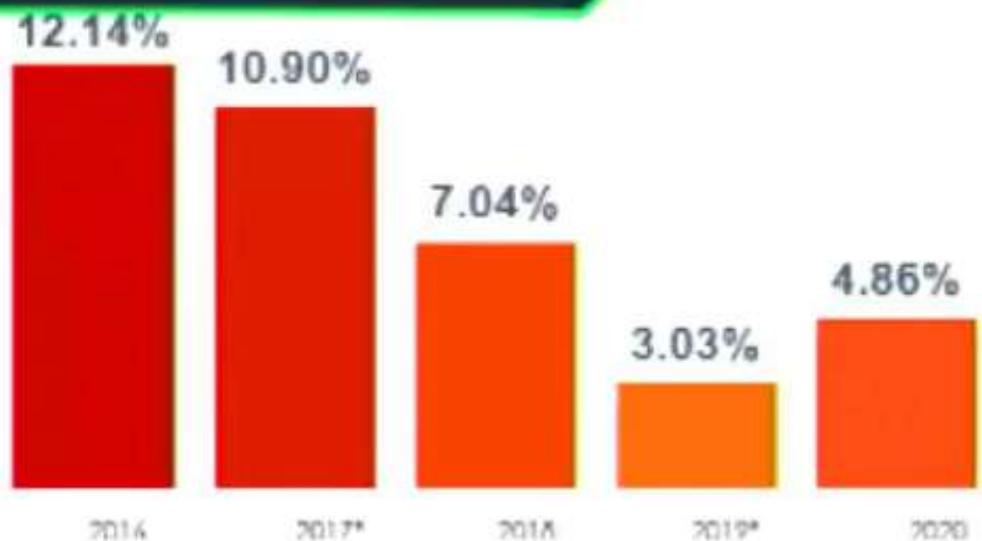
- Dukungan melalui program peningkatan kualitas bahan baku
 - a. Bantuan bibit/benih/pupuk, sarana produksi kepada petani tembakau (diversifikasi tanaman). Pelatihan peningkatan kualitas tembakau.
 - b. Program kerjasama antara Petani tembakau dengan perusahaan mitra
- Dukungan melalui program pembinaan lingkungan sosial, berupa:
 - a. BLT bagi buruh tani tembakau dan buruh rokok
 - b. Pelatihan profesi dan bantuan modal usaha

2. KESEHATAN (25%)

- Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif/preventif maupun kuralif/rehabilitatif
- Mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Covid-19
- Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan dan layanan



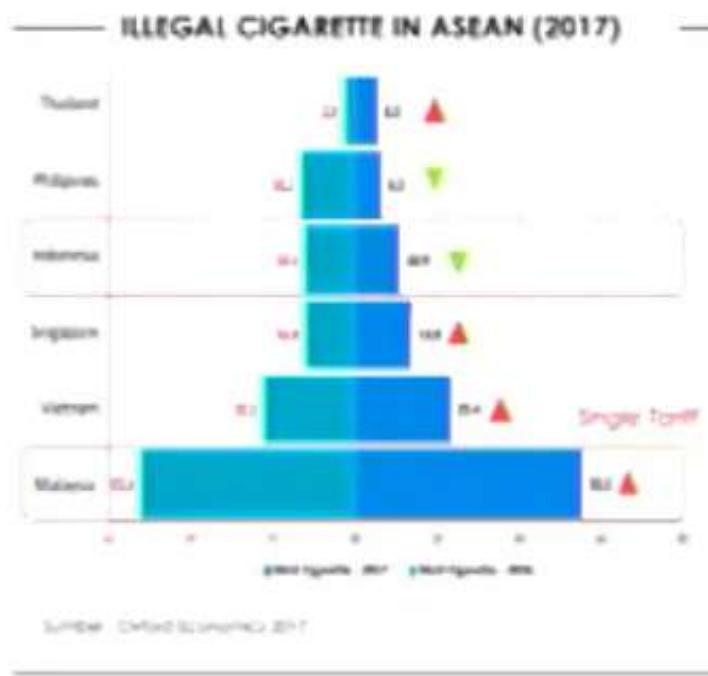
Survey rokok ilegal



Sumber:

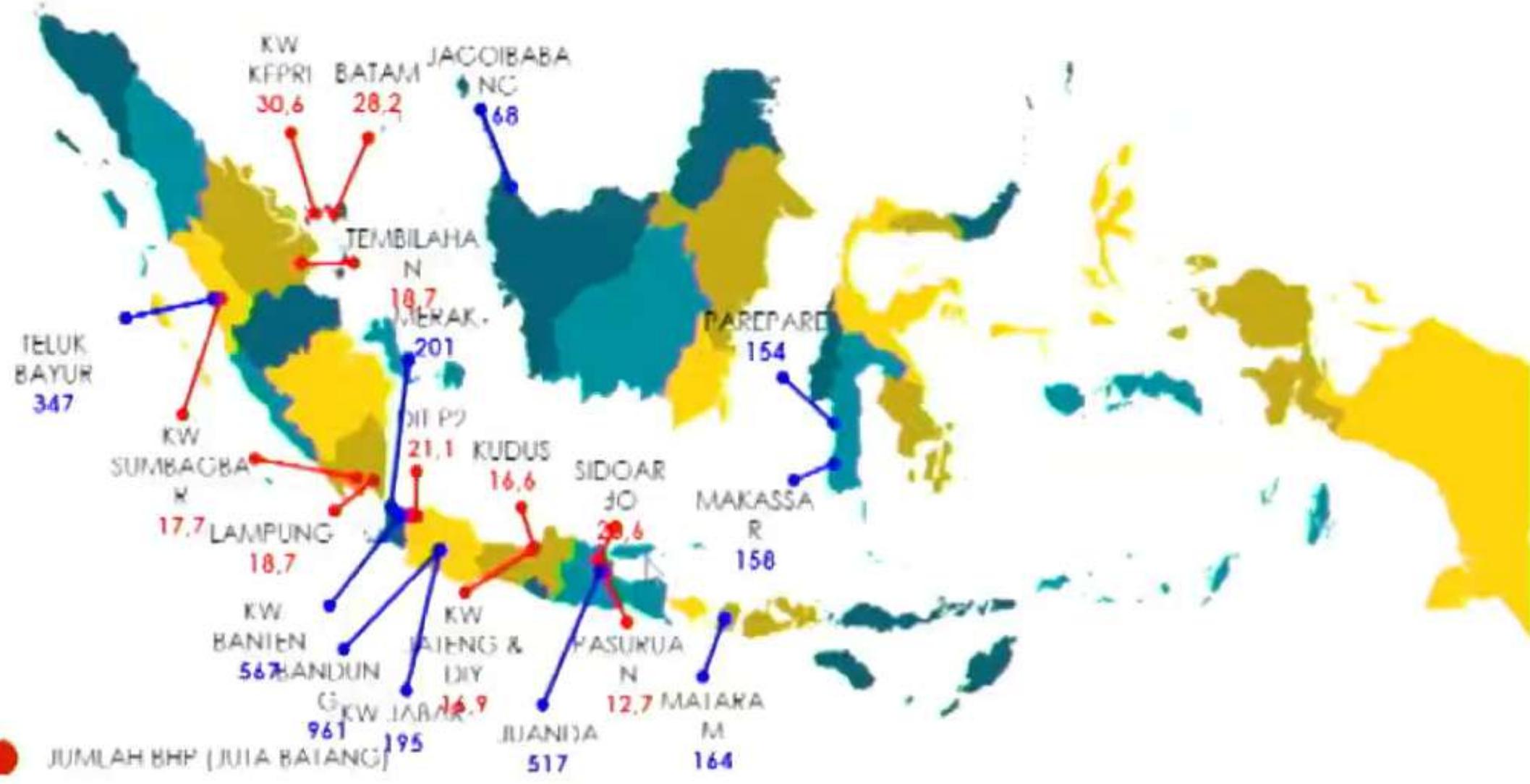
Survey rokok ilegal nasional - UGM (2014-2020)

Survey marak ilegal internasional P2FB (2017-2018), dilansir



1. Sejak tahun 2016 hingga 2019, hasil survei rokok ilegal menunjukkan tren penurunan peredaran rokok ilegal nasional di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil Survei Rokok Ilegal oleh P2FB UGM, tingkat peredaran rokok ilegal di tahun 2020 sebesar 4,86%. Dengan pertimbangan kompleksitas dan struktur industri serta cakupan luasan pengawasan, maka hasil tersebut merupakan hasil yang sangat baik terutama jika dibandingkan dengan tingkat peredaran rokok ilegal di negara-negara ASEAN di tahun 2017.

TOP 10 KANTOR PENINDAK BERDASARKAN JUMLAH BHP (JUTA BATANG)



JUMLAH BHP (JUTA BATANG)



JUMLAH PENINDAKAN